



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



RENCANA KERJA

2025

(0536) 3223756

Jl. Williem AS No. 08, Palangka Raya

www.dlh.kalteng.go.id



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PALANGKA RAYA

2024



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/256/2024
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugrah-Nya lah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini dapat terselesaikan. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Palangka Raya, Juli 2024

KEPALA DINAS



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	9
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD	52
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	53
BAB V PENUTUP	55
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan : (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja. Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran besar dalam mencapai misi tersebut, dimana seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebanyak 11 Program, 20 Kegiatan dan 53 sub kegiatan meliputi:

2.1. Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.11.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.11.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel
2.11.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2.11.04.1.01.06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan BerBahaya Dan Beracun (Limbah B3)
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09.1.01.01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Anggaran	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1	Belanja Operasi	24.934.441.737,00	25.629.317.207,00	21.626.566.594,00	84,38
2	Belanja Modal	10.255.126.423,00	11.264.296.058,00	10.796.673.137,00	95,85
	Total	35.189.568.160,00	36.893.613.265,00	32.423.239.731,00	87,88

Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”. Salah satu misi pembangunan jangka panjang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu: Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sasaran pembangunan yang harus dicapai dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan Indikator Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Target peningkatan IKLH yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah

Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,53	75,17	100,86
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.274,78	1.232.759,88	87,60
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	77	39,20	50,91
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	86	100	116,28
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	1	50,00
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	100,00
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	2	100,00
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18090,12	23.191,61	128,20
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	82,35	100,43

Pengukuran kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tinggi rendahnya nilai IKLH mampu mencerminkan sejauh mana upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. IKLH berfungsi sebagai ukuran performa pengelolaan lingkungan hidup dan menggambarkan secara substansial terkait kualitas lingkungan hidup suatu daerah. IKLH menjadi sumber data dan informasi penting dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

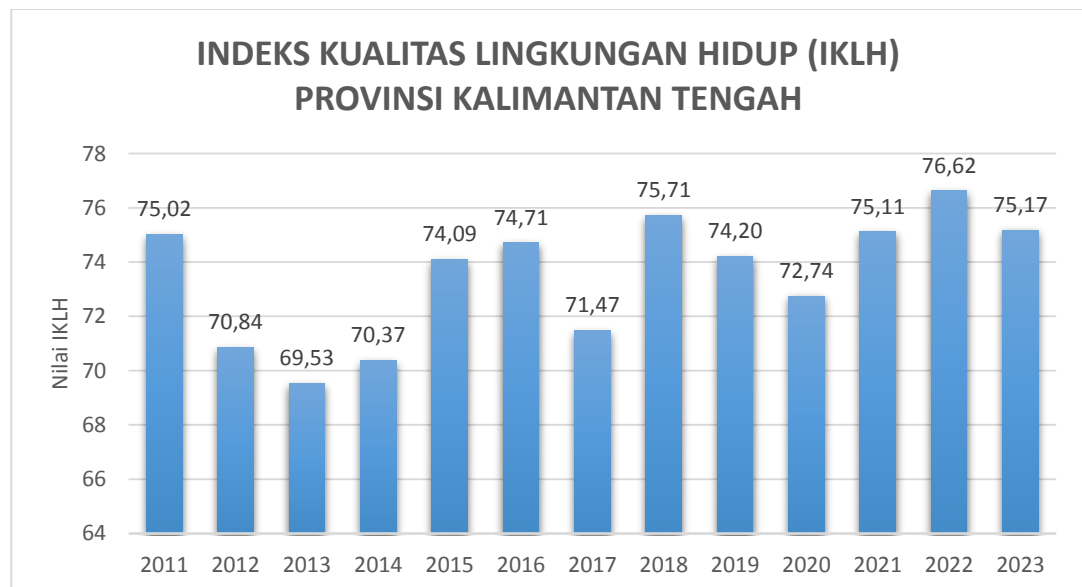
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup didasarkan kepada amanat yang tercantum pada RPJMN dan RPJMD yaitu pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana empat komponen penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH Provinsi yaitu :

1. Indeks kualitas air : derajat keasaman (pH), COD, BOD, TSS, DO, Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), (T-Phosphat), Total Nitrogen, Fecal Coliform, Klorofil-a, dan/atau transparansi;
2. Indeks kualitas udara : Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen dioksida (NO_2)
3. Indeks kualitas air laut : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total ($\text{NH}_3\text{-N}$), Ortofosfat ($\text{PO}_4\text{-P}$) dan oksigen terlarut (DO)
4. Indeks Kualitas Lahan terdiri dari tutupan lahan dan ekosistem gambut.
 - Tutupan lahan : luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan
 - Ekosistem gambut : areal terdampak kanal, areal bekas kebakaran, tutupan lahan, tinggi muka air tanah dan/atau areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan gambut.

Tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 75,17 masuk dalam kategori Baik dengan nilai nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,90; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91,47; Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 75,64; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 77,12.



Gambar 2.2 Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian nasional pada tahun 2023, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 94 Tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, capaian IKLH Nasional Tahun 2023 sebesar 72,54 dari target yang ditetapkan pada RPJMN sebesar 69,48. Terdapat kenaikan sebesar 0,12 Poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaian per indeks sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air : 54,59
- Indeks Kualitas Udara : 88,67
- Indeks Kualitas Lahan : 61,79
- Indeks Kualitas Air Laut : 78,84

Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2023 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.



Gambar 2.3 Capaian IKLH per Provinsi dan Capaian IKLH Nasional Tahun 2023

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 75,17 berada di atas Target Nasional sebesar 69,48 dan di atas capaian Nasional sebesar 72,54.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tahun 2023 telah dilakukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045. Dokumen KLHS sampai dengan saat ini telah ditahap konstultasi publik tahap II yang dilakukan untuk untuk mensinergikan tata waktu dan substansi KLHS RPJPD dengan RPJPD dan mendapatkan informasi mengenai proses penyusunan KLHS

RPJPD yang sedang berjalan di provinsi dan kabupaten/kota. Setelah tahap konsultasi publik ini akan dilakukan penyempurnaan dokumen KLHS yang selanjutnya diajukan proses validasi dokumen ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (RPPLH) telah selesai dilakukan penyusunan dan telah dilakukan proses evaluasi oleh KLHK. Saat ini sedang disusun draf RAPERDA sebagai payung hukum dalam pelaksanaan RPPLH dimaksud. Usulan RAPERDA telah diajukan dalam PROLEGDA oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pemantauan lingkungan selama tahun 2023 yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah adalah pemantauan kualitas air Sungai Kahayan dan pemantauan kualitas udara menggunakan pasiv sampler.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan pemantauan kualitas air sungai DLH Provinsi ada 2 (dua) yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Lamandau, namun karena keterbatasan anggaran maka hanya Sungai Kahayan yang dipantau.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan adalah:

- Terbatasnya sarana prasarana pengambilan sampel
- Titik pantau yang lokasinya berjauhan, sehingga ada potensi holding time dari sampel sampai ke Laboratorium terlewat.

Secara umum dapat dijelaskan capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Analisis status mutu air dilakukan berdasarkan pedoman penentuan status mutu air yang ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran. Indeks kualitas air telah dianggap sebagai salah satu kriteria dalam mengklasifikasi kelas air permukaan, berdasarkan standar parameter karakteristik air yang digunakan.

Kriteria pemantauan kualitas air dilaksanakan dengan melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang

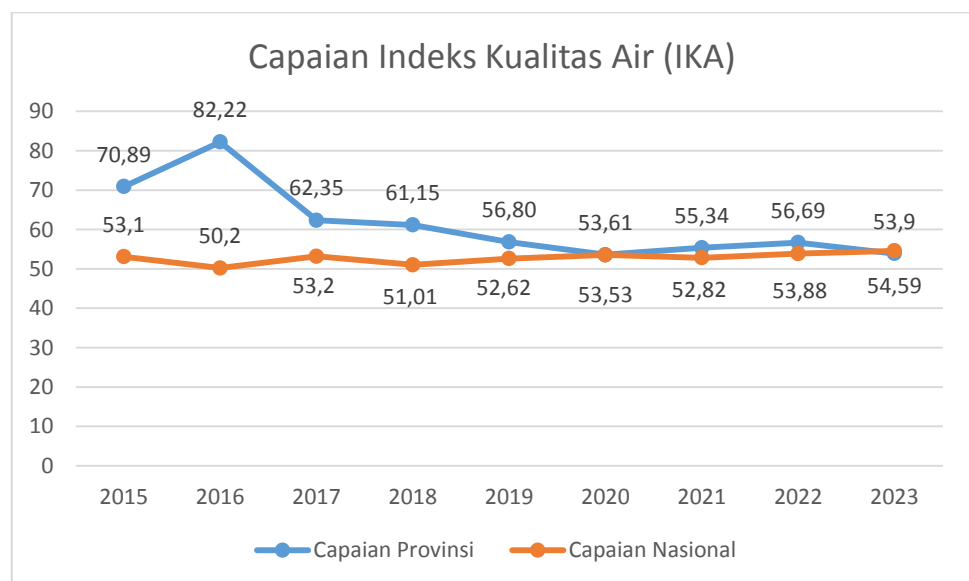
bersumber dari Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dilakukan melalui pemantauan kualitas air pada badan air atau sungai di 328 titik lokasi badan air/sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Frekuensi pemantauan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Lokasi pengambilan sampel air di desain dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan untuk mengetahui kecendrungan pencemaran air sepanjang sungai.

Pada komponen IKA, jumlah parameter yang digunakan untuk perhitungan status mutu air sebanyak 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP dan Fecal Coliform.

Hasil pengujian kemudian menggunakan water pollution Indeks sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air. Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Hasil pengolahan data pengujian kualitas air tahun 2023 menunjukkan nilai IKA sebesar 53,9 kategori sedang, turun bila dibandingkan tahun 2022 nilai 56,69 kategori sedang.



Gambar 2.4 Capaian Indeks Kualitas Air Tahun 2023

Capaian IKA Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,90 di bawah nilai IKA Nasional Tahun 2023 sebesar 54,59. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi.

Secara umum, tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai ;
- Terbatasnya sarana prasarana pengolah air limbah domestik, sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke saluran drainase dan badan air;
- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolah limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah cair ke badan air yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota belum memperhatikan daya tampung beban pencemaran air sungai;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- Melibatkan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan serta memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan lingkungan;
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- Pemenuhan fasilitas pengolahan air limbah secara individual maupun komunal;
- Pengawasan terhadap efluent limbah industri sekitar sungai serta pemeriksaan sampel air efluen industri secara rutin;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

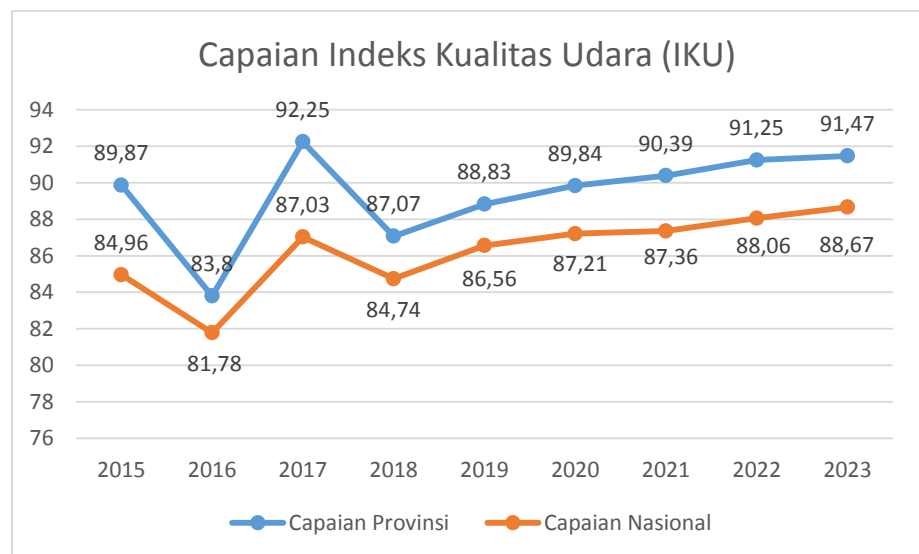
Upaya untuk meningkatkan IKA harus bersinergi dengan program dan kegiatan dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan seluruh masyarakat.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

IKU dihitung setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di 14 kabupaten/kota dengan total sebanyak 114 titik sampel yang tersebar pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode *manual passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 91,47 masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan nilai IKU Tahun 2022 yaitu 91,25 kategori Sangat Baik.



Gambar 2.5 Capaian Indeks Kualitas Udara Tahun 2023

Capaian IKU Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 91,25 di atas nilai IKU Nasional Tahun 2023 sebesar 88,67. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti

kebakaran lahan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Lokasi pemantauan tutupan lahan meliputi Kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Sedangkan lokasi pemantauan kualitas gambut meliputi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budi daya.

Pengambilan data untuk tutupan lahan dan ekosistem gambut dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara.

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam perhitungan nilai IKTL meliputi:

1) Luasan Tutupan hutan (TH)

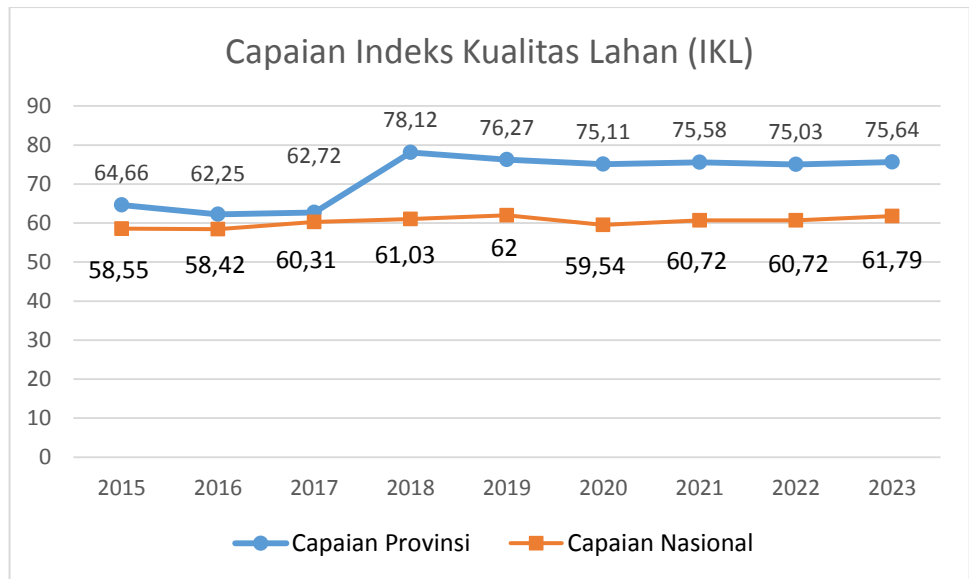
- Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
- Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
- Hutan Mangrove Primer (HMP)
- Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)
- Hutan Rawa Primer (HRP)
- Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)
- Hutan Tanaman

2) Luasan Tutupan Vegetasi Non Hutan

- Belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)

Komponen (parameter) ekosistem gambut meliputi :

- 1) Areal terdampak kanal
- 2) Areal bekas kebakaran
- 3) Tutupan lahan
- 4) Tinggi muka air tanah; dan
- 5) Areal terekspose sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.



Gambar 2.6 Capaian Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023

Capaian IKL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 75,64 di atas nilai IKL Nasional Tahun 2023 sebesar 61,79. Faktor yang mempengaruhi nilai IKL adalah meningkatnya luas tutupan hutan dan penambahan RTH serta RHL.

Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove.

d) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

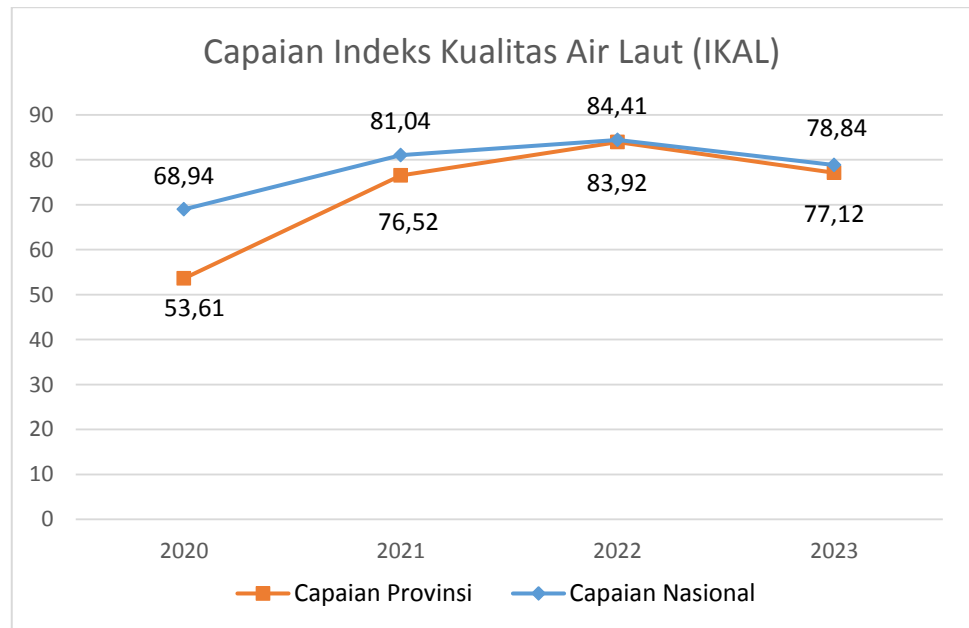
Indeks Kualitas Air Laut adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Lokasi pemantauan kualitas air laut harus memenuhi kriteria:

- Muara sungai utama
- Lokasi berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau
- Ekosistem penting, berupa:
 - Mangrove
 - Terumbu karang
 - Padang lamun
 - Estuari
 - Ekosistem penting lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan

Parameter yang digunakan untuk perhitungan status mutu air laut yaitu padatan tersuspensi total (TSS), minyak dan lemak, ammonia total (NH₃-N) ortofosfat (PO₄-P) dan oksigen terlarut (DO).

Distribusi pencemaran dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut serta proses fisika dan biokimia yang terjadi. Pemilihan titik pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi laut yang dipantau atau lokasi geografi yang ditentukan. Semakin banyak titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Untuk itu, penentuan titik pengambilan sampel di laut harus mempertimbangkan distribusi atau pergerakan bahan pencemar yang diperoleh dari informasi sebelumnya.



Gambar 2.7 Capaian Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2023

Capaian IKAL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 77,12 di bawah nilai IKAL Nasional Tahun 2023 sebesar 78,84. Faktor yang mempengaruhi nilai IKAL adalah tingginya tingkat erosi sehingga berdampak terhadap peningkatan partikel tersuspensi di 11 sungai besar di Kalimantan Tengah yang bermuara ke laut Jawa.

Pembangunan Laboratorium Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membangun Laboratorium Lingkungan Hidup. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan mengingat dari 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak seluruhnya memiliki Laboratorium Lingkungan. Adapun Laboratorium Lingkungan milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada saat ini masih terbatas kemampuan pengujiannya.

Keberadaan Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan mudah diakses bagi pelaku usaha, instansi pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah. Laboratorium Lingkungan ini juga akan mempercepat proses penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu Laboratorium lingkungan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan 100 pelanggan potensial diproyeksikan potensi PAD yang dapat diperoleh mencapai Rp 500.000.000,00. Untuk itu pada tahun 2024 ini diupayakan dapat menjadi Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Saat ini Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah dilengkapi dengan peralatan pengujian kualitas air, termasuk juga 1 (satu) unit mobil laboratorium lingkungan untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel langsung ke lapangan. Pada tahun 2024 ini direncanakan akan dilengkapi dengan peralatan pengujian udara, khususnya untuk pengujian emisi kendaraan bermotor dan emisi cerobong pada industri. Disamping itu juga akan diadakan peralatan portable yang pada musim kemarau akan diarahkan ke kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang rawan kebakaran hutan dan lahan untuk memantau kualitas udara ambien di sana. Kedepannya akan terus dilakukan pengembangan laboratorium, termasuk untuk pengujian tanah.





Gambar 2.8 Bangunan Laboratorium Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Kalimantan Tengah

3. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Capaian kinerja pengelolaan Limbah B3 di Kalimantan Tengah secara langsung diukur dari ketaatan penghasil limbah B3 dalam melaporkan pengelolaan limbah B3-nya di aplikasi SIRAJA LIMBAH. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sebanyak 321 perusahaan dan Fasyankes.

Volume limbah B3 yang dihasilkan selama periode Tahun 2023 yang dilaporkan ke Aplikasi Siraja Limbah sebanyak 1.237.461,6812 ton sedangkan yang telah dilakukan pengelolaan lanjut sebanyak 1.232.759,8756 ton dan sebanyak 4.701,8056 ton masih di simpan di TPS limbah B3.

Pengelolaan limbah B3 oleh perusahaan belum sepenuhnya dilaporkan ke aplikasi siraja limbah sehingga masih banyak data pengelolaan limbah B3 yang belum dilaporkan, hal ini disebabkan oleh:

- Masih banyak perusahaan yang belum memiliki akun Siraja Limbah sehingga belum melaporkan pengelolaannya ke aplikasi ini.
- Kurangnya sosialisasi aplikasi ini ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3

Masih diterimanya limbah B3 oleh pihak ketiga atau pengelola lanjut walaupun pihak penghasil limbah tidak memiliki akun Siraja Limbah.

Pembentukan UPTD Pengolahan Limbah Medis

Tahun 2023, Unit Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Limbah Medis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2023. UPT ini dibentuk dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha/ pemegang konsesi khususnya terkait Pengolahan Limbah Medis yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya. Sedangkan Limbah Medis merupakan barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius.

Limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan sejenisnya, jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup.

Di Kalimantan Tengah, pengelolaan limbah medis membutuhkan biaya yang besar dan masih mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang paham mengenai penanganan limbah medis. Pengolahan limbah medis perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah karena tidak adanya pengolahan limbah medis, sedangkan timbulan limbah medis yang dihasilkan lebih banyak. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya terpadu dari berbagai pihak dalam pengelolaan limbah medis.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Limbah Medis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UPT Pengolahan Limbah Medis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah rencananya akan dibangun di Jalan Tjilik Riwut Km. 15,75 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan letak koordinat geografis 2°07'40.4"N 113°48'41.3"E dan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang ± 19.140 M2 Sembilan belas ribu seratus empat puluh meter persegi.

4. Sasaran Strategis 4 Meningkatkan persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 72 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

Kegiatan pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan salah satu indikator kinerja urusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya di 14 Kabupaten/Kota. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah diawasi pada tahun 2023 sebanyak 176 perusahaan yang terdiri dari pengawasan aktif sebanyak 89 perusahaan, pengawasan pasif sebanyak 75 perusahaan dan proper daerah sebanyak 12 perusahaan. Dari 176 perusahaan yang di awasi, jumlah perusahaan taat sebanyak 69 perusahaan atau 39,20% sedangkan yang tidak taat sebanyak 107 perusahaan (60,80%).

Rendahnya pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Jumlah penanggungjawab usaha yang di awasi meningkat dari tahun awal penyusunan RPJMD (Tahun 2021) yang menjadi dasar penetapan target sebanyak 24 penaggungjawab usaha yang diawasi, sedangkan tahun 2023 yang di awasi sebanyak 176 penaggungjawab usaha;
- Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan masalah lingkungan hidup
- Kurangnya pembinaan kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Rendahnya kesadaran dari dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan.

Pada tahun 2023 jumlah pengaduan dan kasus lingkungan yang dilaporkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 4 kasus. Dari 4 Kasus tersebut seluruhnya telah di Tindaklanjuti dan diselesaikan.

Beberapa laporan lain yang diterima oleh DLH sudah diteruskan ke DLH Kabupaten untuk penanganannya, dikarenakan kewenangan penyelesaian kasusnya ada di Kabupaten/Kota.

Salah satu kendala pencapaian sasaran strategis ini adalah kurangnya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan minimnya SDM yang berkompeten untuk melakukan pengawasan/verifikasi lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah masyarakat hukum adat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup ada 3 yaitu :

- Keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH

Kegiatan inventarisasi kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah fasilitasi pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan MHA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mendorong pembentukan MHA, DLH bersama dengan Borneo Nature Foundation juga telah menerbitkan Buku Pedoman Pembentukan MHA.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah sampai dengan tahun 2023 yaitu :

Tabel 2.4 Penetapan MHA di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Lokasi MHA	Desa	Luas MHA (Ha)	Luas HA(Ha)	No Surat Keputusan Gubernur/ Bupati Penetapan MHA
1	2	3	4	5	6
I	Prov Kalteng				
	1. MHA Rungan	Kel. Mungku Baru, Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Desa. Parempei, Desa. Bereng Malaka Kec. Rungan Kab Gumas	46.946	5.416	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 188.44/436/2022
II	Kab Pulang Pisau				
	1. MHA Pilang	Desa Pilang, Kec. Jabiren Raya	-	102	105.Thn 2019
	2. MHA Ramang	Desa Ramang, Kec. Banama Tingang	-	1.850	464 Thn 2019
	3. MHA Simpur	Desa Simpur, Kec. Jabiren Raya	-	1.009	469 Thn 2019
	4. MHA Dayak Ngaju Hariten Halaum Benteng	Desa Tangkahen Kec. Banama Tingang	-	1.199,36	596 Thn 2022
	5. MHA Sakakajang	Desa Sakakajang, Kec. Jabiren Raya	-	132	-
	6. MHA Bereng Rambang	Desa Bereng Rambang, Kec.	-	980	-

No	Nama Lokasi MHA	Desa	Luas MHA (Ha)	Luas HA(Ha)	No Surat Keputusan Gubernur/ Bupati Penetapan MHA
1	2	3	4	5	6
		Kahayan Tengah			
III	Kab Kapuas				
	1. MHA Timpah	Desa Timpah, Kec. Timpah	-	-	490/DLH Thn 2021
	2. MHA Barunang	Desa Barunang, Kec. Kapuas Tengah	-	-	406/DLH Thn 2022
IV	Kab Sukamara				
	1. MHA Dayak Tomun	Desa Kenawan, Kec. Permata Kecubung	±10.818.688	±6,7225	188.45/415/2019
	2. MHA Dayak Jelai Ruku Mapam	Desa. Nibung Terjun, Kec. Permata Kecubung	-	±40	188.45/416/2019
	3. MHA Dayak Gambu Dalam	Desa. Kartamulia, Kec. Sukamara	148 km ²	±2	188.45/417/2019
	4. MHA Dayak Jelai Lari	Desa. Semantun, Kec. Permata Kecubung	18.200	±40	188.45/418/2019
V	Seruyan				
	1. MHA Bukit Kambe	Kel. Pantau Pulut, Kec. Seruyan Tengah	-	10,49	188.49/186/2021
VI	Gunung Mas				
	1. Dayak Ot Danum Himba Antang Ambun Liang Bungai Kedamangan Miri Manasa	Desa Harowu, Rangan Hiran, Tumbang Masukih, Kec. Miri Manasa	39.792	±14.224	100.3.3.2/344/2023
	2. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung Kedamangan Miri Manasa	Desa Tumbang Hatung, Kec. Miri Manasa	8.258	±3.092	100.3.3.2/344/2023
	3. Dayak Ngaju Lewu Tehang Kedamangan Manuhing Raya	Desa Tehang, Kec. Manuhing Raya	16.520	±15.708	100.3.3.2/344/2023
	4. Dayak Ngaju Lewu Tumbang Kuayan Kedamangan Rungan Barat	Desa Tumbang Kuayan, Kec. Rungan Barat	2.910	±1.250	100.3.3.2/344/2023
	5. Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei Kedamangan Rungan Barat	Desa Tumbang Bahanei, Kec. Rungan Barat	5.865	±5.110	100.3.3.2/344/2023
	6. Dayak Ngaju Lewu Tumbang Malahoi Kedamangan Rungan	Desa Tumbang Malahoi, Kec. Rungan	3.305	±2.012	100.3.3.2/344/2023
	7. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Mahuroi, Kec. Damang Batu	182.276	±7.444	100.3.3.2/344/2023
	8. Dayak Ot Danum Lowu Karetai Sarian Kedamangan Damang Batu	Desa Karetai Sarian, Kec. Damang Batu		±2.181	100.3.3.2/344/2023
	9. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Anoi, Kec. Damang Batu		±2.872	100.3.3.2/344/2023
	10. Dayak Ot Danum Lowu Karetai Rambangun	Desa Karetai Rambangun, Kec. Damang Batu		±2.956	100.3.3.2/344/2023

No	Nama Lokasi MHA	Desa	Luas MHA (Ha)	Luas HA(Ha)	No Surat Keputusan Gubernur/ Bupati Penetapan MHA
1	2	3	4	5	6
	Kedamangan Damang Batu				
	11. Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji Kedamangan Damang Batu	Desa Lawang Kanji, Kec. Damang Batu		±1.046	100.3.3.2/344/2023
	12. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Maraya, Kec. Damang Batu		±894	100.3.3.2/344/2023
	13. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Posu, Kec. Damang Batu		±996	100.3.3.2/344/2023
	14. Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Marikoi Kedamangan Damang Batu	Desa Tumbang Marikoi, Kec. Damang Batu		±3.123	100.3.3.2/344/2023
VII	Kab Katingan				
	1. MHA Keramat	Desa Petak Bahandang Kec Tasik Payawan			522/431 Tahun 2023
	2. MHA Kalaru Manuah	Desa Telaga Kec Kamipang			522/438 Tahun 2023

Jumlah MHA di Kalimantan Tengah yang terbentuk sampai saat ini masih sangat terbatas, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Belum maksimalnya sosialisasi pembentukan dan manfaat MHA ke Desa-Desa.
 - Keterbatasan dana untuk proses pembentukan MHA oleh DLH Kabupaten/Kota.
 - Persiapan pembentukan MHA sampai saat ini masih terbatas pada pembentukan Panitia di Kabupaten/Kota namun belum ada tindak lanjut pembentukannya.
 - Belum jelasnya mekanisme evaluasi dan verifikasi usulan MHA yang diusulkan oleh Masyarakat Adat.
- Kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 melakukan beberapa kegiatan terkait pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup diantaranya :
 - Pendidikan pelatihan pengelolaan sampah terutama pelatihan komposting dan daur ulang sampah dari botol bekas
 - Pelaksanaan perayaan Hari Peduli Sampah nasional (HPSN) dengan kegiatan utama aksi kebersihan di kawasan wisata sabangau.
 - Perayaan Hari Lingkungan Hidup sedunia dengan agenda beberapa kegiatan yaitu Apel dan pelaksanaan Workshop dengan narasumber dari Perguruan Tinggi dan praktisi dibidang lingkungan hidup
 - Kampanye lingkungan baik melalui media elektronik, media sosial, maupun media cetak oleh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Saat ini sedang dilakukan pengembangan terhadap website <https://www.dlh.kalteng.go.id>

sehingga informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan interaktif. Informasi kegiatan dan kampanye lingkungan yang aktif dilakukan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah melalui Instagram dan Facebook.

- Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pelaporan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan aplikasi SIMPEL.
- Penghargaan lingkungan

Tahun 2023 ada beberapa kegiatan penghargaan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Adiwiyata

ADIWIYATA berasal dari 2 kata sansekerta yaitu ADI dan WIYATA. Adi sendiri mempunyai arti yaitu besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Sedangkan Wiyata mempunyai arti tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika. ADIWIYATA artinya tempat yang besar, agung, baik dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita..

Penilaian/evaluasi Sekolah Adiwiyata mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Penilaian calon Sekolah Adiwiyata dilakukan melalui tahapan, yaitu seleksi administratif dan penilaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata.

Pada Tahun 2023, jumlah keseluruhan usulan sekolah Adiwiyata yang terdiri dari Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 31 sekolah terdiri dari sekolah dasar dan menengah serta perpanjangan penetapan sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri sebanyak 64 sekolah.

Dalam menetapkan penghargaan kepada Calon sekolah Adiwiyata dilakukan dengan pembinaan, penilaian dan evaluasi. Tahapan yang dilakukan yaitu pelaksanaan sosialisasi, verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan/fisik, yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur untuk sekolah Adiwiyata Provinsi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang nantinya akan ditetapkan penghargaan melalui surat keputusan.

Penetapan penghargaan Adiwiyata Tahun 2023 antara lain :

- Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 21 Sekolah Adiwiyata Provinsi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah
1.	Sukamara	SDN Pudu Rundun
		MIS Darul Arqam
		SD Perdana
		SMPN 3 Sukamara
		SMPN 1 Sukamara
2.	Lamandau	SMPN 4 Bulik
3.	Seruyan	SDS Eka Tjipta Terawan
		SMPS Eka Tjipta Perdana
		SMPN 1 Kuala Pembuang
		SMPN 2 Kuala Pembuang
		SMPS Tunas Agro
4.	Kotawaringin Barat	SDN 5 Madurejo
		SDN 8 Madurejo
		SDN 3 Pasir Panjang
		SMKN 2 Pangkalan Bun
5.	Kotawaringin Timur	SDN 3 Mentawa Baru Hulu
		SDS Bina Bangsa 01
		MTsN 2 Kotawaringin Timur
		SMPS Bumitama Metro Cempaga
		SMAN 1 Cempaga
		SMKN Best Agro 1

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1061/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023, sebanyak 4 sekolah

Tabel 2.6 Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah
1.	Kotawaringin Timur	SDS Bumitama Cempaga Hulu
		SDS Karya Makmur Bahagia
		SMK Gunajaya
2.	Seruyan	SD Wijaya Kusuma 2

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1062/MENLHK/P2SDM/SDM.2/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023, sebanyak 1 sekolah.

Tabel 2.7 Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023

No	Kab /Kota	Nama Sekolah
1.	Seruyan	SMPS – 4 Best Agro International

2. Adipura

Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.

Kegiatan pemantauan dan penilaian kota bersih dan sehat (Adipura) Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 s/d Maret 2024 berdasarkan surat Direktur Penanganan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.173/PAS/PE/PLB.0/7/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Tim Pemantau Adipura Tahun 2023. Penilaian Adipura mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 Tahun 2019 tentang Adipura. Penilaian Adipura dibagi dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama yaitu penilaian Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap ketaatan pelaporan kinerja pengelolaan sampah daerah melalui SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) <https://sipsn.menlhk.go.id/>. Dari penilaian tahap pertama tersebut ditetapkanlah beberapa Kabupaten/ Kota yang lolos untuk menjadi peserta pemantauan, penilaian, dan pengamatan saat dilapangan. Tahap kedua adalah penilaian dan pengamatan saat dilapangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (KLHK) dengan melibatkan pemerintah provinsi.

Berdasarkan koordinasi dan pemantauan penilaian Adipura bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masing-masing Kabupaten Kota, penilaian dilakukan pada tempat/ lokasi titik pantau/ penilaian sebagai berikut :

1. Permukiman Menengah Sederhana
2. Permukiman Pasang Surut
3. Jalan Arteri/ Utama dan Jalan Kolektor/ Penghubung
4. Pasar Tradisional
5. Pertokoan
6. Perkantoran
7. Sekolah
8. Rumah Sakit dan Puskesmas
9. Terminal Bus/ Angkot
10. Pelabuhan Penumpang
11. Bandara Udara

12. Hutan Kota
13. Taman Kota
14. Perairan Terbuka (Sungai/ Danau)
15. Saluran Air Terbuka
16. Pantai Wisata
17. Bank Sampah Unit
18. Bank Sampah Induk
19. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Secara umum penilaian menitik beratkan pada indikator kebersihan, pengelolaan sampah pada masing-masing titik lokasi/ titik pantau. Selain indikator kebersihan dan pengelolaan sampah, indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tiap titik pantau atau lokasi juga dinilai.

Penilaian pada indikator RTH dilakukan dengan cara mengamati kerapatan tajuk, kerapatan jenis pohon, dan keanekaragaman jenis pohon atau tumbuhan yang tertanam.

Indikator pengelolaan sampah mencakup sarana pengelolaan sampah seperti ketersediaan tempat pembuangan sampah (tong sampah), jumlah sarana terpilah, dan kondisi sarana pembuangan sampah (terawat/ tidak terawat).

Penilaian dan pemantauan Adipura juga menitikberatkan pada lokasi seperti TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah, Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit, dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Penetapan hasil penilaian Adipura beserta rincian penilaian dari tiap-tiap indikator penilaian akan ditetapkan dan diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran.

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

PROPER merupakan salah satu upaya KLHK bertujuan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2004 telah mengusulkan beberapa perusahaan untuk ikut dalam program Proper. Pada awalnya hanya diikuti oleh 5 (lima) perusahaan dan saat ini telah diikuti oleh 93 Perusahaan, di sektor perkebunan kelapa sawit, energi dan migas dan pertambangan.

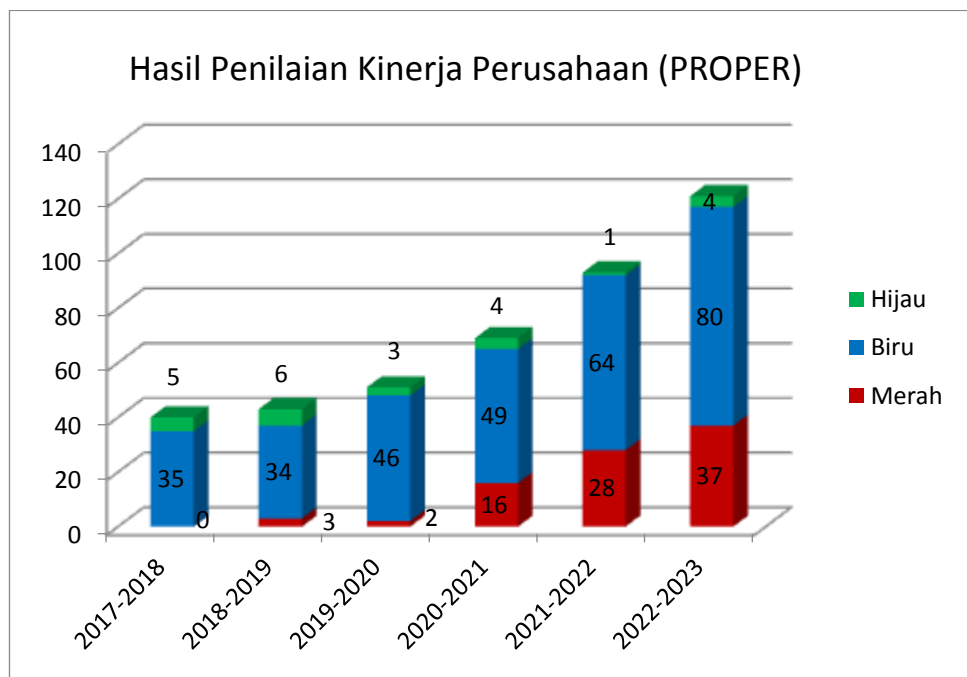
Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri dari:



Gambar 2.9 Peringkat kinerja perusahaan

Proses penilaian Proper dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), sehingga lebih mudah cepat dan akurat. Apabila mekanisme penilaian ini berjalan baik, diharapkan jumlah peserta perusahaan yang ikut dalam program PROPER semakin bertambah di tahun-tahun yang akan datang.

Jumlah peserta (perusahaan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengikuti penilaian Proper Tingkat Nasional Periode Penilaian Tahun 2022-2023 sebanyak 128 perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1353/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tanggal 15 DESEMBER 2023 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 - 2023, sebanyak 4 perusahaan hijau, 80 perusahaan biru dan 37 perusahaan merah.



Gambar 2.10 Hasil Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)

4. Program Kampung Iklim (Proklam)

Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Melalui pelaksanaan Proklam, pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklam mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2023 tentang Program Kampung Iklim.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1090/MENLHK/PPI/PPI.1/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penerima Penghargaan Proklam Tahun 2023, 1 (satu) desa yaitu Desa Pararapak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan mendapatkan penghargaan Proklam Lestari dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor SK.28/PPI/API/PPI.0/ 10/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklam Kategori Proklam Pratama dan Proklam Madya Tahun 2023, Provinsi Kalimantan Tengah penerima penghargaan sertifikat Program kampung Iklim (Proklam) Proklam Kategori Pratama sebanyak 49 lokasi, dan Proklam Kategori Madya sebanyak 43 lokasi.

6. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2021. Sistem pengelolaan ini akan mengelola data tentang pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. SIPSN sendiri merupakan *platform* pengelolaan sampah terintegrasi yang dapat diakses publik untuk memenuhi kebutuhan data secara cepat, akurat, dan *up-to-date*. SIPSN diharapkan dapat berjalan dengan konsep *big data* sehingga dapat membantu masyarakat untuk dapat mengetahui kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Hal ini terutama terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) periode 1 Tahun 2023 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Neraca Pengelolaan Sampah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	463.121,24
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	28.064,89
	Persentase pengurangan sampah	6,06
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	2.850,32
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	2.022,96
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	23.191,61
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	136.802,91
	Persentase penanganan sampah	29,54
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	1.821,04
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	1.452,02
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	396,02
g	Pemrosesan akhir	134.981,87
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	134.981,87
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	164.867,80
	Persentase sampah terkelola	35,60
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	298.253,44
	Persentase sampah tidak terkelola	64,40

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

Tabel 2.9 Perencanaan dan Capaian Persampahan Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1 Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBU LAN (ton)	TARGET PENGU RANGA N (%)	TARGET PENA NGA NAN (%)	TIMBULAN SAMPAH (ton)	PENGURA NGAN SAMPAH (ton)	%	PENANGA NAN SAMPAH (ton)	%	
1	Kab. Kotawaringin Barat	59224,75	27	72	50175,64	6462,77	12,88	29596,03	58,98	YA
2	Kab. Kotawaringin Timur	100729	27	72	85951,17	0	0	27901,59	32,46	YA

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBU LAN (ton)	TARGET PENGU RANGA N (%)	TARGET PENAN GAN (%)	TIMBULAN SAMPAAH (ton)	PENGURA NGAN SAMPAAH (ton)	%	PENANGA NAN SAMPAAH (ton)	%	
3	Kab. Kapuas	69203,43	27	72	78008,17	989,39	1,27	8429,37	10,81	YA
4	Kab. Barito Selatan	32232070	27	72	24018,1	1265,95	5,27	2058,28	8,57	YA
5	Kab. Barito Utara	19536	27	72	23833,48	1411,46	5,92	9168,8	38,47	YA
6	Kab. Seruyan	42431,4	27	72	30308,14	16,57	0,05	5269,69	17,39	YA
7	Kab. Sukamara	0			0	0	0	0	0	TIDAK
8	Kab. Lamandau	10333	27	72	15240,5	912,5	5,99	0	0	TIDAK
9	Kab. Gunung Mas	28818,99	27	72	36119,94	0	0	7553,67	20,91	TIDAK
10	Kab. Pulang Pisau	25933,38	27	72	25183,18	0,24	0	1546,87	6,14	TIDAK
11	Kab. Murung Raya	22243,01	27	72	20488,55	1425,49	6,96	0	0	TIDAK
12	Kab. Barito Timur	0	27	72	16849,28	316,41	1,88	4552,83	27,02	YA
13	Kota Palangkaraya	56945	27	72	56945,11	15264,11	26,8	40725,79	71,52	YA
					463121,24	28064,89		136802,91		

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

Dari data di atas, jumlah timbulan sampah yang didaur ulang sebesar 23.191,61 ton. Data tersebut masih bersifat sementara karena data capaian provinsi Kalimantan Tengah merupakan agregasi dari seluruh Kabupaten/Kota.

Persentase pengurangan sampah pada tahun 2023 sebesar 6,06% sedangkan penanganan sampah sebesar 29,54%. Pencapaian kinerja pengelolaan persampahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Masih terdapat beberapa kabupaten yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya di SIPSN dikarenakan keterbatasan SDM dan data serta tidak tersedianya jembatan penimbangan di TPA, sehingga tidak diketahui volume sampah yang dikurangi dan di tangani.
- Kelembagaan penanganan sampah di Kabupaten/Kota ada yang belum sepenuhnya di serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten (jumlah armada, sarana TPA, dll)

7. Sasaran Strategis 7 Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Untuk mencapai sasaran strategis 7 yaitu Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat.

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, setiap tahunnya melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan tujuan untuk melihat sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksana survei dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/85/V.1/DLH tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Metode survei yaitu dengan penyampaian kuisioner metode secara langsung atau tatap muka di unit pelayanan publik dan melalui link https://bit.ly/survey_dlh.

Jumlah responden mengikuti survey sebanyak 147 orang yang dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2023. Berikut ini data karakteristik responden yang mengikuti survei:

Tabel 2.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	98	66,67%
Wanita	49	33,33%

Tabel 2.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/Sederajat	10	6,80%
Strata 1	66	44,90%
Strata 2	58	39,46%
Strata 3	13	8,84%

Tabel 2.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
ASN/PNS	67	45,58%
Swasta/Wiraswasta	74	50,34%
Masyarakat	6	4,08%

Tabel 2.13 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan	Jumlah	Persentase
Konsultasi KLHS, RPPLH	2	1,36%
Konsultasi Teknis Bidang Lingkungan Hidup	3	2,04%
Layanan Konsultasi PROPER	1	0,68%
Layanan Konsultasi ADIWIYATA	0	0,00%
Layanan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	4	2,72%
Layanan Pengurusan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)	122	82,99%
Layanan Permohonan Data/ Informasi Lingkungan Hidup	1	0,68%
Layanan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3	3	2,04%
Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis	0	0,00%
Pengawasan	3	2,04%
Persampahan	1	0,68%

Metode pengolahan data sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menghasilkan nilai SKM, skor SKM, mutu layanan dan kinerja layanan pada layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan IV (Empat) tahun 2023 dengan hasil survei sebagai berikut :

Tabel 2.14 Nilai SKM dan Skor Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

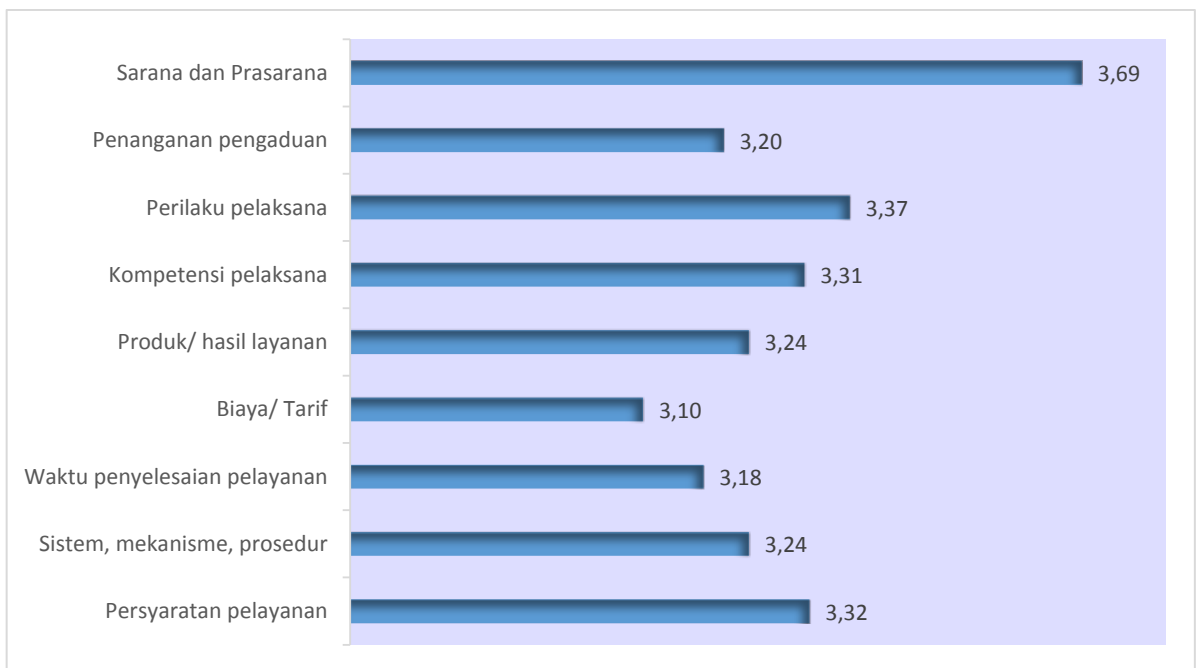
No.	Pelayanan	Nilai SKM	Skor	Mutu	Kinerja
1.	Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	82,35	3,29	B	Baik

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16 diperoleh nilai SKM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 82,35 dengan skor pelayanan sebesar 3,29 mutu layanan B dan kinerja unit pelayanan “Baik”.

Jika dilihat lebih lanjut 9 unsur pelayanan yang ditanyakan pada responden, maka nilai rata-rata Pelayanan berada pada nilai 77,38 – 92,18. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 3.17 dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.15 Skor per Pertanyaan pada Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Index
A	Persyaratan pelayanan	3,32	82,99
B	Sistem, mekanisme, prosedur	3,24	80,95
C	Waktu penyelesaian pelayanan	3,18	79,42
D	Biaya/ Tarif	3,10	77,38
E	Produk/ hasil layanan	3,24	80,95
F	Kompetensi pelaksana	3,31	82,82
G	Perilaku pelaksana	3,37	84,35
H	Penanganan pengaduan	3,20	80,10
I	Sarana dan Prasarana	3,69	92,18
Jumlah Unsur Digunakan :		9,000	
Total		3,27	82,35



Gambar 2.11 Rata-rata Nilai per Pertanyaan pada Pelayanan DLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah sarana dan prasarana dengan nilai 3,69 (kinerja sangat baik), responden yang menggunakan jasa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merasa sarana dan prasarana sudah sangat baik. Unsur layanan yang kualitasnya masih rendah adalah biaya/tarif dengan skor 3,10 (baik).

Keberhasilan capaian kinerja secara tidak langsung ditunjang oleh seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka pendek atau tahunan dalam Rencana Kerja (Renja)

dan juga dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja yaitu :

- a. Sasaran Strategis 1 Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi 1 tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
 - 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - (a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi
 - (2) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
 - (b) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - (2) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- b. Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah :
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - (a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
 - (b) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - (1) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - (a) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - (3) Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati

- c. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan
Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan adalah :
- 1) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - (a) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- d. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah :
- 1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - (a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengkajian dampak lingkungan
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - (2) Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
 - 2) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - (a) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi.
- e. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :
- 1) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH
 - (a) Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

- 2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - (a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - (2) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - (3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
- 3) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - (a) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat
 - (1) Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah :

 - 1) Program Pengelolaan Persampahan
 - (a) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
- g. Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Aparatur, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya Kualitas Aparatur, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah:

 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - (a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - (4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - (5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - (6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - (7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- (c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - (2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- (d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - (3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- (e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - (6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - (4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selain dukungan program dan kegiatan secara langsung sebagaimana program dan kegiatan di atas, sejatinya seluruh program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja) maupun pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PD telah mendukung dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah. Integrasi IKU dalam seluruh program dan kegiatan secara lebih rinci dapat digambarkan pada Rencana Kinerja Tahunan yang terlampir pada dokumen Laporan Kinerja ini.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam tabel 2.2 (lampiran 2).

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur dimaksud maka tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
2. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
4. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, salah satu misi yakni misi ke-1 (satu) merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah **"Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan"**. Tujuan dari misi tersebut adalah **Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**. Sasaran dan indikator sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yaitu **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**. Sasaran tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.16 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Kalimantan Tengah

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Misi 1 Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	Tugas Pokok: Dinas Lingkungan Hidup tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Fungsi : • perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; • perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; • pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Faktor Penghambat: • Belum terkelolanya limbah domestik dari pemukiman • Meningkatnya lahan akses terbuka sehingga meningkatkan erosi yang berdampak terhadap penurunan kualitas air • Tingginya alih fungsi lahan pada kawasan yang memiliki tutupan lahan berhutan sehingga menurunkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Faktor Pendorong: • Adanya regulasi kewajiban pengelolaan limbah domestik. • Adanya program nasional peningkatan infrastruktur sanitasi pemukiman • Adanya Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian kebakaran lahan, dimana dilahan gambut tidak lagi diperkenankan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; • pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Belum Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Faktor Penghambat: • Adanya perubahan peraturan yang mewajibkan mengintegrasikan dokumen perencanaan perlindungan Air, Udara dan Laut ke dalam dokumen RPPLH • Adanya revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah sehingga perlu dilakukan sinkronisasi antara RTRWP dan RPPLH Faktor Pendorong: • Telah disusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut • Telah disusunnya kajian awal dokumen RPPLH Kalimantan Tengah
			Rendahnya peran serta masyarakat dan masyarakat adat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Faktor Penghambat: • Keterbatasan SDM Kabupaten/Kota dalam pengusulan dan pembentukan masyarakat hukum adat. • Keterbatasan anggaran dalam proses verifikasi Faktor Pendorong: • Tersedianya pedoman pembentukan MHA di Kalimantan tengah • Adanya kerjasama dengan NGO terutama Borneo Nature Foundation yang membantu mendorong pembentukan masyarakat hukum adat
			Peningkatan Sampah dan Limbah B3	Faktor Penghambat: • Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah • Belum maksimalnya program 3 R.

No.	Visi/Misi/Program Kerja Gubernur Kalimantan tengah	Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				- Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan - Belum tersedianya sarana pengolahan/pemusnahan limbah b3 Faktor Pendorong: - Terbentuknya kelompok-kolompok masyarakat peduli sampah yang melakukan pengelolaan 3 R. - Tersusunnya Jakstrada Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Tengah - Tersediannya jasa pengumpul limbah B3 skala Provinsi.
			Rendahnya ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Faktor Penghambat: - Belum adanya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) - Terbatasnya jumlah anggaran pengawasan dibandingkan dengan jumlah usaha yang harus diawasi - Berubahnya regulasi dan belum ada kejelasan kewenangan pengawasan pasca terbitnya UUCK dan PP 22 tahun 2021 Faktor Pendorong: - Tersedianya ASN DLH Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengikuti Diklat Dasar-Dasar PPLH - Adanya program PROPER KLHK untuk menilai ketaatan perusahaan secara tindak langsung melalui SIMPEL sehingga mengurangi yang jumlah yang diawasi.

Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, secara umum meliputi:

- a. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meliputi :

- a. Tingginya alih fungsi lahan

Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan deforestasi dan banjir berbagai kegiatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta aktifitas masyarakat menyebabkan tekanan terhadap laju perubahan tutupan lahan di Kalimantan Tengah. Hasil analisis spasial terhadap perubahan tutupan lahan dari Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa luasan areal tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer berkurang seluas - 5.502,17 Ha, tutupan lahan Hutan Lahan Kering Sekunder 43.667,50 Ha, sedangkan areal perkebunan bertambah seluas +146.411,56 Ha selama 1 tahun. Perubahan tutupan lahan ini berdampak terhadap penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKTLH pada Tahun 2018 sebesar 78,12 sedangkan pada Tahun 2019 turun menjadi 76,27. Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak dapat dievaluasi dengan kondisi IKTL Tahun 2018 dan 2019 karena rumus perhitungannya mengalami perubahan. Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan lahan ini adalah peningkatan pada saat hujan sehingga mengakibatkan volume air limpasan meningkat dan berdampak pada banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Selain dampak banjir, perubahan tutupan lahan ini mengakibatkan peningkatan erosi. Tanah yang ikut terbawa aliran hujan akan masuk ke badan air, sehingga berdampak terhadap pendangkalan alur pelayaran di beberapa Sungai di Kalimantan Tengah.

- b. Kerusakan Fungsi Ekosistem Gambut

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 35 unit KHG dengan luas 4.733.540 ha sesuai SK Menteri LHK No. SK. 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017. KHG tersebar di 11 kabupaten/kota dan KHG terluas berada di KHG S. Katingan – S. Sebangau, yaitu 862.240 ha (18,21%). Sedangkan kabupaten yang memiliki dataran gambut terluas adalah Kabupaten Pulang Pisau seluas 933.815 ha atau 19,75% dari total luas gambut di Kalimantan Tengah. Secara umum 35 unit KHG memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan rawa seluas 851.134 ha, semak belukar seluas 774.730 ha, dan hutan mangrove primer seluas 297.315 ha.

Di Provinsi Kalimantan Tengah telah terindikasi adanya kerusakan ekosistem gambut yang didominasi oleh kerusakan ringan dengan luasan 1.906.740 ha (89,71 %) pada fungsi Budidaya Ekosistem gambut dan 2.467.182 ha (94,64 %) pada fungsi lindung ekosistem Gambut. Area yang mengalami kerusakan (rusak berat) pada fungsi budidaya ekosistem gambut 28.204 ha dan pada fungsi lindung ekosistem gambut 18.385 ha. Sedangkan area yang tidak rusak masing-masing seluas 14.508 ha (FBEG) dan 2.497 ha (FLEG).

c. Pencemaran air akibat buangan limbah domestik, industri dan pertanian

Faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas air di Kalimantan Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya usaha/kegiatan industri pengolahan dan ekstraktif, rendahnya anggaran pengawasan serta masih minimnya sarana pengolahan limbah domestik dari rumah tangga di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu pada peningkatan volume limbah domestik dan menjadi peningkatan volume limbah domestik dan menjadi penyebab peningkatan beban pencemaran di sungai.

Selain itu yang memengaruhi penurunan kualitas air adalah limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan, penggunaan pupuk & pestisida. Data tahun 2019 menunjukkan ada 104 unit pabrik pengolahan TBS kelapa sawit dengan kapasitas 6.488 ton per jam dan 2 unit pengolahan CPO menjadi minyak goreng dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Pabrik pengolahan ini tersebar di hampir semua kabupaten. Penggunaan pupuk di perkebunan besar kelapa sawit akan memengaruhi kualitas air baik air tanah ataupun air permukaan. Saat ini ada telah tertanam lebih dari 1,7 ha oleh tanaman kelapa sawit dan karet. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfor yang tidak hati-hati akan dapat mencemari sumber air dan perairan. Demikian juga limbah pengolahan pertambangan baik yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan ataupun pertambangan rakyat dapat memengaruhi kualitas air. Akibat dari tekanan terhadap penurunan kualitas air yang cukup tinggi, berdampak pada penurunan kualitas air, hal ini ditunjukkan dari nilai IKA (Indeks Kualitas Air). Parameter Kualitas Air, yang diukur dalam penentuan IKA adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik) dan Tahun 2019 sebesar 56,80 (kurang baik).

d. Rendahnya pengelolaan persampahan

Perkembangan perkotaan di Kalimantan Tengah cukup signifikan karena banyaknya aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang terkonsentrasi di kota provinsi ataupun kabupaten/kota. Konsekuensi dari konsentrasi penduduk di perkotaan ini tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan. Penduduk Kalimantan Tengah tahun 2019 mencapai 2.605.274 jiwa dengan 498.688 rumah tangga. Konsentrasi penduduk terbesar terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat dan Palangka Raya. Kepadatan penduduk masih sangat kecil yaitu 17 jiwa per km². Kabupaten terpadat adalah Palangka Raya dengan nilai 115 jiwa per km².

Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS di atas, dan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 0,7 kg/orang/hari maka jumlah sampah di Kalimantan Tengah perhari yang dihasilkan pada tahun 2018 sebanyak 1.862,25 ton/hari sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.900,40 ton/hari.

Permasalahan sampah ini berdampak pada terbentuknya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Disperkimtan) terdapat 111 kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan mencapai 6.998 Ha. Terkait dengan masalah persampahan, pada tahun 2018 hanya ada 2 (dua) dari 14 kabupaten/kota yang mampu memperoleh penghargaan ADIPURA, yaitu Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di perkotaan masih belum maksimal dan terlaksana dengan baik.

Isu-isu penting tersebut di atas menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2024

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun sesuai dengan visi misi Gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup juga menyesuaikan tema tersebut guna mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya untuk terkait dengan kelestarian lingkungan hidup.

Review terhadap RKPD Tahun 2024 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 (Lampiran 3). Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik

atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non *government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi termasuk penyelenggaraan Forum PD dan/atau Gabungan PD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang secara lengkap dirinci pada tabel 2.4 (Lampiran 4).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agar penetapan prioritas pembangunan tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, maka perlu adanya penelaahan arah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Hasil dari pemetaan dan analisis korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah tercantum pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut

Tabel 3.1 Tema Rencana Kerja Daerah Tahun 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025	Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 berpedoman pada kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan diselaraskan dengan tema pembangunan prioritas provinsi yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi
Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mendukung secara langsung prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Berdasarkan dokumen Renstra telah ditetapkan tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

a. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya prosentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, tertuang dalam lampiran 5 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 akan disesuaikan dengan plafon anggaran untuk masing-masing SKPD, sehingga tidak semua program Kegiatan yang direncanakan bisa terakomodir. Tetapi tetap diupayakan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2025 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang berisikan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2025 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 5, Tabel 4.1.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum pada Tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung pada beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu bidang saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut

menjadi jelas. Oleh karena itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar bidang pelaksana dari program dan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan kebijakan nasional, program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi. Selain itu juga bertujuan untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain- lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud.

Saran dan masukan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025 ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan dokumen ini.

Dibuat di : Palangka Raya

Pada tanggal : Juli 2024

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197606022005011010

L A M P I R A N

LAMPIRAN 1

TABEL 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**TABEL 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Perangka Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)														
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD														
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	6	Dokumen	67%
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	Laporan	6	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	12	Laporan	67%
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD														
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	327	Orang/ bulan	108	Orang/ bulan	54	Orang/ bulan	54	Orang/ bulan	100%	57	Orang/ bulan	219	Orang/ bulan	67%
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0%	1	Laporan	2	Laporan	50%
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	0%	2	Laporan	4	Laporan	50%
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah														
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	0%	1	Paket	2	Paket	50%
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48	Orang	12	Orang	6	Orang	6	Orang	100%	10	Orang	28	Orang	58%
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD														
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	67%
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	0	Paket	3	Paket	3	Paket	0%	3	Paket	6	Paket	50%
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	4	Paket	67%
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	0	Unit	4	Unit	4	Unit	0%	0	Unit	4	Unit	67%
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6	Paket	0	Paket	3	Paket	3	Paket	0%	1	Paket	4	Paket	67%
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	0%	1	Unit	2	Unit	50%
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	0%	1	Unit	2	Unit	50%
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD														
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD														
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130	Unit	40	Unit	20	Unit	20	Unit	100%	20	Unit	80	Unit	62%
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	0	Unit	0%
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	4	Unit	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan														
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH														
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS														
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	10	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	3	Dokumen	4	Dokumen	40%
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	12	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	3	Dokumen	6	Dokumen	50%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH														
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup														
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	7	Dokumen	78%
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	3	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	33%
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provins	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	33%
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	36	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0	Lokasi	0%	12	Lokasi	12	Lokasi	33%
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	9	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	3	Unit	3	Unit	33%
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	33%
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	6	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	4	Laporan	67%
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati														
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi														
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0%	1	Dokumen	2	Dokumen	50%
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	4,2	Ha	0	Ha	1,2	Ha	1,2	Ha	0%	1	Ha	2	Ha	52%
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	550	Orang	100	Orang	150	Orang	150	Orang	100%	200	Orang	450	Orang	82%
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati lainnya yang Dikelola lingkup kewenangan provinsi	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	33%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)														
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH														
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi														
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	12	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	6	Dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	15	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	5	Orang	5	Orang	33%
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1314	Badan Usaha	600	Badan Usaha	300	Badan Usaha	176	Badan Usaha	59%	138	Badan Usaha	914	Badan Usaha	70%
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	3	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	1	Orang	1	Orang	33%
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH														
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH														
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH														
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan														
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi														
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	360	Orang	120	Orang	60	Orang	60	Orang	100%	60	Orang	240	Orang	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan	6	Lembaga	2	Lembaga	1	Lembaga	1	Lembaga	100%	1	Lembaga	4	Lembaga	67%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat														
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/ dunia usaha														
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	18	Entitas	6	Entitas	3	Entitas	3	Entitas	0%	3	Entitas	12	Entitas	67%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup														
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani														
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provins	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	3	Perkara	0	Perkara	0	Perkara	0	Perkara	0%	1	Perkara	1	Perkara	33%
2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	36	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	12	Orang	12	Orang	33%
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provins	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	3	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	1	Orang	1	Orang	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2026)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	3	Perkara	0	Perkara	0	Perkara	0	Perkara	0	1	Perkara	1	Perkara	33%
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	6	Pengaduan	2	Pengaduan	1	Pengaduan	1	Pengaduan	100%	1	Pengaduan	4	Pengaduan	67%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang														
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah														
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%
2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	33%
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	67%
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	33%
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	5.087,48	Ton	1648,32	Ton	840,64	Ton	663	Ton	79%	849,05	Ton	3160	Ton	62%
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	1	Dokumen	1	Dokumen	33%

LAMPIRAN 2

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah



**TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			74,53 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	74,17 Poin	74,75 Poin	74,97 Poin	75,16 Poin	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
3	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).			1.407.274,777 ton	1.407.474,827 ton	1.407.674,877 ton	1.407.874,927 ton	1.232.759,88 ton	1.407.474,827 ton	1.407.674,877 ton	1.407.874,927 ton	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
4	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)			77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	39,20%	78,00%	79,00%	80,00%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
5	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)			86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	100,00%	87,00%	88,00%	89,00%	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
6	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH			2 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	1 MHA	2 MHA	2 MHA	2 MHA	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
7	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
8	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat			2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	2 Penghargaan	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)			18.090,23 ton	18.271,13 ton	18.636,55 ton	18.822,92 ton	23.191,61 ton	18.271,13 ton	18.636,55 ton	18.822,92 ton	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target
10	Nilai Kepuasan Masyarakat			82 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai	82,35 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025 memakai nilai dan angka target

LAMPIRAN 3

TABEL 2.3

Review Terhadap RKPD Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah



**TABEL 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase keterlaksanaan (%)	100%	16.639.340.636,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase keterlaksanaan (%)	100%	18.176.656.871,00	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 Dokumen	461.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 Dokumen	611.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	350.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	500.000.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	56.000.000,00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	100%	9.379.191.256,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	100%	10.020.554.871,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	9.359.191.256,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	10.000.554.871,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	60.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	60.000.000,00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	45.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	45.000.000,00	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	100%	210.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)	100%	460.000.000,00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	350.000.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	1.208.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	1.488.000.000,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	650.000.000,00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	80.000.000,00	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Kalteng dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	53.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi Kalteng dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	53.000.000,00	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	2.250.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	2.517.102.000,00	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palangka Raya	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atai Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palangka Raya	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atai Lapangan yang Disediakan	1 Unit	717.102.000,00	
2	Pengadaan Mebel	Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	Pengadaan Mebel	Palangka Raya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	
4	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Palangka Raya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan PD	100%	1.521.149.380,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan PD	100%	1.760.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.113.649.380,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.250.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	100%	1.550.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	100%	1.260.000.000,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	700.000.000,00	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	
B	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000,00	
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen	350.000.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen	350.000.000,00	
1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	
2	Penetapan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	300.000.000,00	Penetapan RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	300.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
II	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen	150.000.000,00	
1	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	3 Dokumen	100.000.000,00	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	3 Dokumen	100.000.000,00	
2	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	50.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kalimantan Tengah	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	50.000.000,00	
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		IKLH	74,75	7.035.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		IKLH	74,75	15.005.000.000,00	
1	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	5 Kegiatan	6.860.000.000,00	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	5 Kegiatan	14.805.000.000,00	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	125.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	500.000.000,00	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	300.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	300.000.000,00	
3	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kalimantan Tengah	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	200.000.000,00	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Kalimantan Tengah	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	250.000.000,00	
4	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provins	Kalimantan Tengah	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	1.000.000.000,00	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provins	Kalimantan Tengah	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	100.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	Kalimantan Tengah	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	12 Lokasi	100.000.000,00	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	Kalimantan Tengah	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	12 Lokasi	110.000.000,00	
6	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	150.000.000,00	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	190.000.000,00	
7	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	35.000.000,00	
8	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 Unit	2.500.000.000,00	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	1 Unit	1.000.000.000,00	
9	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	450.000.000,00	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	200.000.000,00	
10	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	12.120.000.000,00	
II	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan	175.000.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	175.000.000,00	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	200.000.000,00	
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah dokumen profil Kehati	1 Dokumen	1.300.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah dokumen profil Kehati	1 Dokumen	500.000.000,00	
I	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	1 Kegiatan	1.300.000.000,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	1 Kegiatan	500.000.000,00	
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000,00	
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kalimantan Tengah	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Hektar	1.000.000.000,00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kalimantan Tengah	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Hektar	350.000.000,00	
3	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	100.000.000,00	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Kalimantan Tengah	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	50.000.000,00	
4	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kalimantan Tengah	Unit Taman Kehati lainnya yang Dikelola lingkup kewenangan provinsi	1 Unit	100.000.000,00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kalimantan Tengah	Unit Taman Kehati lainnya yang Dikelola lingkup kewenangan provinsi	1 Unit	50.000.000,00	
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1.407.474,827 ton	550.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1.407.474,827 ton	15.580.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Usaha	550.000.000,00	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Usaha	15.580.000.000,00	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kalimantan Tengah	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	10.000.000,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	500.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	15.570.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	78%	2.305.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	78%	2.700.000.000,00	
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	138 Perusahaan	2.305.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	138 Perusahaan	2.700.000.000,00	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	3 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	3 Dokumen	350.000.000,00	
2	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	225.000.000,00	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	300.000.000,00	
3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	162 Badan Usaha	2.000.000.000,00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	162 Badan Usaha	2.000.000.000,00	
4	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	30.000.000,00	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
G	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH		Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 MHA	200.000.000,00	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH		Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 MHA	400.000.000,00	
I	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	2 MHA	100.000.000,00	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	2 MHA	200.000.000,00	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	200.000.000,00	
II	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	200.000.000,00	
H	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2 Kegiatan	525.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2 Kegiatan	825.000.000,00	
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2 Kegiatan	525.000.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2 Kegiatan	825.000.000,00	
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	275.000.000,00	
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 Orang	225.000.000,00	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 Orang	450.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ k elompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	100.000.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Kalimantan Tengah	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ k elompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	100.000.000,00	
I	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2 Penghargaan	600.000.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2 Penghargaan	650.000.000,00	
I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat		Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/ dunia usaha	2 Penghargaan	600.000.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat		Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/ dunia usaha	2 Penghargaan	650.000.000,00	
1	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	600.000.000,00	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kalimantan Tengah	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	650.000.000,00	
J	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	87%	890.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	87%	1.350.000.000,00	
I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan yang ditangani	100%	890.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan yang ditangani	100%	1.350.000.000,00	
1	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	100.000.000,00	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	200.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	250.000.000,00	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Kalimantan Tengah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang	250.000.000,00	
3	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 Orang	150.000.000,00	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	12 Orang	300.000.000,00	
4	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	350.000.000,00	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	450.000.000,00	
5	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 Pengaduan	40.000.000,00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 Pengaduan	150.000.000,00	
K	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	18.271,13 Ton	6.900.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	18.271,13 Ton	23.002.327.500,00	
1	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional		Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	1 Kegiatan	6.900.000.000,00	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional		Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	1 Kegiatan	23.002.327.500,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000,00	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kalimantan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1.800.000.000,00	
4	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Kalimantan Tengah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1 Unit	500.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Kalimantan Tengah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1 Unit	14.602.327.500,00	
5	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	866,03 ton	5.500.000.000,00	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Kalimantan Tengah	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	866,03 ton	6.000.000.000,00	
6	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	500.000.000,00	
	JUMLAH				37.444.340.636,00	JUMLAH				78.688.984.371,00	

LAMPIRAN 4

TABEL 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah



TABEL 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 / KEGIATAN MUSREMBANG TAHUN 2024

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepala Desa Wungkur Nanakan	Kelurahan / Desa	Tingginya alih fungsi lahan	Alih fungsi lahan perkebunan karet menjadi perkebunan buah, dikarenakan penurunan hasil (diganti dengan Sawit unggul dan Kakao)	Desa Wungkur Nanakan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
2	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Menurunnya persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	Pembinaan ke Desa-Desa Proklamasi, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah (1 Desa Rp 50.000.000)	Desa Mangkarap, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
3	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Menurunnya persentase lembaga desa yang dibina dalam upaya pembangunan desa	Pembinaan ke Desa-Desa Proklamasi, Sosialisasi, Pembagian Bibit dan Bak Sampah (1 Desa Rp 50.000.000)	Desa Balawa, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
4	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca (1 Dokumen Rp 150.000.000)	Kab. Barito, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
5	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (1 Paket Rp. 7.873.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
6	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (1 Dokumen Rp. 150.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
7	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat Kabupaten/Kota (Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tampa 5 Desa Rp. 250.000.000)	Desa Mangkarap, Desa Balawa, Desa Muruduyung, Desa Tangkan, Desa Tampa, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
8	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (a. Kendaraan Roda 4 (Empat)/Pick Up 1 Unit, b. Mobil Ski Lift (Pemangkas Dahan Pohon 1 unit, Rp. 2.350.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (1 Paket Rp. 1.279.024.172)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
10	Ir. FRANZ SILA UTAMA, MAP	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (1 Paket Rp. 10.530.000.000)	Tamiang Layang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur
11	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembudidayaan maggot untuk pengelolaan Sampah. (1 Paket)	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
12	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat transportasi pengangkut sampah (Tossa). 2 Unit	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
13	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
14	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembuatan bak sampah permanen. (1 Paket)	Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
15	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan truk pengangkut sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
16	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Unit	Kec. Kapuas Murung, Kel. Palingkau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
17	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 3 Unit	Kec. Basarang, Desa Pangkalan Rekan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
18	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan TPA untuk pembuangan Sampah. (1 Unit)	Kec. Basarang, Desa Pangkalan Rekan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
19	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembuatan Bak Sampah Permanen. (15 Unit)	Kec. Basarang, Desa Pangkalan Rekan, Rt. 03,04,05,06 dan 07 , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Tengah, Desa Hurung Pukung, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
21	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Paket)	Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
22	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 1 Paket	Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
23	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan TPA untuk pembuangan Sampah. (1 Unit)	Kec. Kapuas Tengah, Desa Pujon, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
24	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Taman Ramah Anak dengan Fasilitas WC, Wifi, CCTV, Tempat olahraga dan Pojok Baca. (1 Paket)	Kecamatan Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
25	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kec. Timpah, Desa Aruk, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
26	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (1 Unit)	Kec. Timpah, Desa Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
27	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembangunan Tempat Penampungan Akhir Sampa. (1 Paket)	Kec. Timpah, Desa Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
28	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Penanganan Sampah dilingkungan Sekolah SD. (1 Paket)	Kec. Timpah, Desa. Timpah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
29	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Program Kampung Iklim. (1 Kegiatan)	Kec. Kapuas Hilir, Kel. Sei Pasah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
30	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pembuatan Taman Ramah Anak/ Ruang Terbuka Hijau. (1 paket)	Kec. Selat, Kel. Selat Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
31	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Alat Transportasi Pengangkut Sampah (Tossa). 10 Unit	Kab. Kapuas, Kec. Selat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
32	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Pengangkut Sampah. (2 Unit)	Kab. Kapuas, Kec. Selat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan Truk Sampah 2 Unit x 700jt = 1,4M. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan	Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
34	Drs. CATUR FERIYANTO, MT	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Kendaraan Roda 3 sebanyak 10 Unit x 50jt = 500 jt. Dibutuhkan dalam upaya penguatan pengelolaan persampahan	Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas
35	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Belum optimalnya pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Masih Kurangnya armada Truk Amrol untuk mengangkut sampah ke TPA sebanyak 2 unit	Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, dan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan
36	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Masih Kurangnya bak Amrol tempat pembuangan sampah sementara sebanyak 10 unit	Kel. Kasongan Baru, Kel. Kasongan Lama dan Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan
37	JONIAN TO, SP, M.A.P	Bappeda Kab/Kota	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Masih Kurangnya Kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah rumah tangga ke TPS sebanyak 5 unit	Kel. Kasongan Baru Kel. Kasongan Lama dan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan
38	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan alat laboratorium untuk pengujian kualitas lingkungan (7 unit, Rp 2.120.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
39	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Sepeda Motor Operasional Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (4 unit, Rp 130.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
40	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan mobil operasional pemantauan kualitas lingkungan (1 unit, Rp 550.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Review Dokumen RPPLH (1 Dokumen, Rp 350.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
42	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Verifikasi Dokumen Review RPPLH (1 SK Verifikasi, Rp 50.000.000,-)	Jl. H.M. Rafi'i Nomor 169 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
43	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Alat Laboratorium untuk Pengujian Kualitas Lingkungan (7 Unit Pagu 2,120,000,000)	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
44	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Sepeda Motor Operasional Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (4 Unit Pagu 130,000,000)	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
45	Prof. Dr. JUNI GULTOM, ST.,MTP.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Pengadaan Mobil Operasional Pemantauan Kualitas Lingkungan (1 Unit Pagu 550,000,000)	Kecamatan Arut Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat
46	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Belum adanya pelaksanaan kegiatan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 500.000.000	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
47	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Minimnya sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan berupa ruang laboratorium pengujian kualitas air seluas 180 m2 sebesar Rp 1.500 .000.000,-	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
48	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	penurunan kualitas air	Belum adanya peralatan pengujian logam berat dan senyawa pencemaran kualitas air berupa Instrumen ICP atau AAS sebanyak 1 unit beserta alat penunjangnya sebesar Rp 2.300 .000.000,-	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur
49	RAMADANSYAH, S.E., M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Akibat tingginya alih fungsi lahan menyebabkan penurunan kualitas udara (Efek Gas Rumah Kaca) dimana peralatan pengujian beserta alat penunjangnya masih kurang yang memerlukan biaya sebesar Rp 1.500 .000.000,-	Jalan Jend. Sudirman KM. 6,7 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur

No.	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	SUNARDI,S.Si.,M.Sc.,M.E ng	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Tingginya Alih Fungsi Lahan (Penyusunan Dokumen RPPEG/RPPLH)	Jl. Tijilk Riwut Km. 8.5 , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara
51	SUNARDI,S.Si.,M.Sc.,M.E ng	Bappeda Kab/Kota	Tingginya alih fungsi lahan	Penyusunan Dokumen KEHATI (1 Dokumen)	Jl. Tjilik Riwut No. KM 8,5 Natai Sedawak Kec. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara

LAMPIRAN 5

TABEL 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah**



**TABEL 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)		100%	18.176.656.871,00			100%	18.689.602.000,00
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD		9 Dokumen	611.000.000,00			9 Dokumen	687.500.000,00
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palangka Raya	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD		1 Dokumen	550.000.000,00
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palangka Raya	3 Laporan	56.000.000,00	APBD		3 Laporan	60.000.000,00
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palangka Raya	1 Laporan	15.000.000,00	APBD		1 Laporan	17.500.000,00
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD		100%	10.020.554.871,00			100%	10.080.000.000,00
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palangka Raya	63 Orang/Bulan	10.000.554.871,00	APBD		63 Orang/Bulan	10.050.000.000,00
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	15.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Palangka Raya	2 Laporan	10.000.000,00	APBD		2 Laporan	15.000.000,00
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	60.000.000,00			100%	70.000.000,00
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palangka Raya	1 Laporan	45.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD (%)		100%	460.000.000,00			100%	490.000.000,00
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palangka Raya	1 Paket	350.000.000	APBD		1 Paket	350.000.000
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palangka Raya	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palangka Raya	10 Orang	100.000.000	APBD		10 Orang	125.000.000
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD		100%	1.488.000.000,00			100%	1.660.000.000,00
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	150.000.000,00	APBD		1 Paket	175.000.000,00
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	650.000.000,00	APBD		1 Paket	700.000.000,00
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	30.000.000,00	APBD		1 Paket	50.000.000,00
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palangka Raya	1 Dokumen	80.000.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya	1 Laporan	25.000.000,00	APBD		1 Laporan	30.000.000,00
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng dan Luar Daerah	1 Laporan	500.000.000,00	APBD		1 Laporan	550.000.000,00
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya	1 Dokumen	53.000.000,00	APBD		1 Dokumen	55.000.000,00
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah		100%	2.517.102.000,00			100%	2.567.102.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atai Lapangan yang Disediakan	Palangka Raya	1 Unit	717.102.000,00	APBD		1 Unit	717.102.000,00
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Palangka Raya	1 Paket	300.000.000,00	APBD		1 Paket	350.000.000,00
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palangka Raya	1 Unit	1.000.000.000,00	APBD		1 Unit	1.000.000.000,00
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palangka Raya	1 Unit	500.000.000,00	APBD		1 Unit	500.000.000,00
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD		100%	1.760.000.000,00			100%	1.760.000.000,00
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palangka Raya	1 Laporan	500.000.000,00	APBD		1 Laporan	500.000.000,00
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palangka Raya	1 Laporan	1.250.000.000,00	APBD		1 Laporan	1.250.000.000,00
2.11.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD		100%	1.260.000.000,00			100%	1.375.000.000,00
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palangka Raya	20 Unit	700.000.000,00	APBD		24 Unit	750.000.000,00
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palangka Raya	1 Unit	500.000.000,00	APBD		1 Unit	550.000.000,00
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palangka Raya	1 Unit	60.000.000,00	APBD		1 Unit	75.000.000,00
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan		1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	580.000.000,00
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH		1 Dokumen	350.000.000,00			1 Dokumen	380.000.000,00
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD		1 Dokumen	325.000.000,00
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS		1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	200.000.000,00
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Kalimantan Tengah	3 Dokumen	100.000.000,00	APBD		3 Dokumen	125.000.000,00
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Kalimantan Tengah	3 Dokumen	50.000.000,00	APBD		3 Dokumen	75.000.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH		74,75	15.005.000.000,00			74,97	15.375.000.000,00
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Kalimantan Tengah	5 Kegiatan	14.805.000.000,00			5 Kegiatan	15.175.000.000,00
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD		1 Dokumen	550.000.000,00
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	300.000.000,00	APBD		1 Dokumen	350.000.000,00
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Paket	250.000.000,00	APBD		1 Paket	275.000.000,00
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provins	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Kalimantan Tengah	1 Laporan	100.000.000,00	APBD		1 Laporan	150.000.000,00
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Kalimantan Tengah	12 Lokasi	110.000.000,00	APBD		12 Lokasi	150.000.000,00
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	190.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Kalimantan Tengah	1 Unit	1.000.000.000,00	APBD		1 Unit	1.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Kalimantan Tengah	1 Unit	200.000.000,00	APBD		1 Unit	250.000.000,00
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	12.120.000.000,00	APBD		1 Dokumen	12.200.000.000,00
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup		1 Kegiatan	200.000.000,00			1 Kegiatan	200.000.000,00
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Laporan	200.000.000,00	APBD		1 Laporan	200.000.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati		1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	1.400.000.000,00
2.11.4.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi		1 Kegiatan	500.000.000,00			1 Kegiatan	1.400.000.000,00
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	125.000.000,00
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Hektar	350.000.000,00	APBD		1 Hektar	1.000.000.000,00
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kalimantan Tengah	50 Orang	50.000.000,00	APBD		50 Orang	125.000.000,00
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati lainnya yang Dikelola lingkup kewenangan provinsi	Kalimantan Tengah	1 Unit	50.000.000,00	APBD		1 unit	150.000.000,00
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)		1.407.474,827 ton	15.580.000.000,00			1.407.674,877 ton	15.675.000.000,00
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		1 Usaha	15.580.000.000,00			1 Usaha	15.675.000.000,00
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD		1 Dokumen	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	15.570.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.600.000.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH		78%	2.700.000.000,00			79%	2.650.000.000,00
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi		138 Perusahaan	2.700.000.000,00			138 Perusahaan	2.650.000.000,00
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Kalimantan Tengah	3 Dokumen	350.000.000,00	APBD		3 Dokumen	350.000.000,00
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kalimantan Tengah	5 Orang	300.000.000,00	APBD		5 Orang	250.000.000,00
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kalimantan Tengah	162 Badan Usaha	2.000.000.000,00	APBD		162 Badan Usaha	2.000.000.000,00
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Kalimantan Tengah	1 Orang	50.000.000,00	APBD		1 Orang	50.000.000,00
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH		2 MHA	400.000.000,00			2 MHA	400.000.000,00
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH		2 MHA	200.000.000,00			2 MHA	200.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		1 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00			1 Kelompok Masyarakat	200.000.000,00
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD		1 Dokumen	200.000.000,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan		2 Kegiatan	825.000.000,00			2 Kegiatan	925.000.000,00
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi		2 Kegiatan	825.000.000,00			2 Kegiatan	925.000.000,00
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	275.000.000,00	APBD		1 Dokumen	300.000.000,00
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Kalimantan Tengah	60 Orang	450.000.000,00	APBD		60 Orang	500.000.000,00
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kalimantan Tengah	1 Lembaga	100.000.000,00	APBD		1 Lembaga	125.000.000,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat		2 Penghargaan	650.000.000,00			2 Penghargaan	650.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/ dunia usaha		2 Penghargaan	650.000.000,00			2 Penghargaan	650.000.000,00
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kalimantan Tengah	3 Entitas	650.000.000,00	APBD		3 Entitas	650.000.000,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup		87%	1.350.000.000,00			88%	1.200.000.000,00
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani		100%	1.350.000.000,00			100%	1.200.000.000,00
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provins	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Perkara	200.000.000,00	APBD		1 Perkara	200.000.000,00
2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas P	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Kalimantan Tengah	12 Orang	250.000.000,00	APBD		12 Orang	275.000.000,00
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ya	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	12 Orang	300.000.000,00	APBD		1 Perkara	300.000.000,00
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Kalimantan Tengah	1 Perkara	450.000.000,00	APBD		1 Perkara	375.000.000,00
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kalimantan Tengah	1 Pengaduan	150.000.000,00	APBD		1 Pengaduan	50.000.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		18.271,13 Ton	23.002.327.500,00			18.636,55 Ton	22.825.000.000,00
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah		1 Kegiatan	23.002.327.500,00			1 Kegiatan	22.825.000.000,00
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	75.000.000,00
2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Kalimantan Tengah	1 Unit	50.000.000,00	APBD		1 Unit	75.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	1.800.000.000,00	APBD		1 Dokumen	1.800.000.000,00
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Kalimantan Tengah	1 Unit	14.602.327.500,00	APBD		1 Unit	14.650.000.000,00
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Kalimantan Tengah	866,03 ton	6.000.000.000,00	APBD		883,44 ton	6.000.000.000,00
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	500.000.000,00	APBD		1 Dokumen	225.000.000,00
JUMLAH					78.688.984.371,00				80.369.602.000,00